

**RESPON PARTAI DALAM PEMENUHAN KUOTA
PEREMPUAN PADA PENCALONAN LEGISLATIF 2019:
STUDI KASUS: PDIP KOTA SEMARANG**

JURNAL

Oleh:

RM M Rizqi Raharjo

14010115140114

Pembimbing

Dra. Fitriyah M.A.



Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

**RESPON PARTAI DALAM PEMENUHAN KUOTA
PEREMPUAN PADA PENCALONAN LEGISLATIF 2019:
STUDI KASUS: PDIP KOTA SEMARANG**

Oleh: RM M Rizqi Raharjo

Abstrak

Rendahnya keterwakilan perempuan di bidang politik membuat tidak terpenuhinya kepentingan-kepentingan perempuan. Di Indonesia tuntutan akan kesetaraan gender dalam berpolitik baru dapat terrealisasi pada pemilu 2004. Dengan adanya Affirmative action merupakan jaminan bahwa perempuan untuk dapat lebih bersaing dengan politisi laki-laki dalam hal pencalonan legislatif. Affirmative action ini juga mendorong partai politik untuk lebih giat dalam rekrutmen calon anggotanya legislatifnya khususnya pada calon legislatif perempuan. Tidak semua partai politik mendukung kebijakan ini dikarenakan kentalnya budaya patriarki dan sedikitnya kader perempuan serta sulitnya mendapatkan seorang calon legislatif perempuan yang berkualitas. Untuk memenuhi kuota 30% Perempuan banyak partai politik yang asal-asalan dalam merekrut calon anggota legislatif perempuan dan calon perempuan tersebut di berikan pada nomor urut besar sehingga memperkecil peluang keterpilihan calon perempuan tersebut. PDI Perjuangan sangatlah mendukung kebijakan affirmative ini karena menilai bahwa kebijakan ini merupakan suatu langkah maju untuk perempuan agar lebih mengerti politik, agar bisa memperjuangkan kepentingan perempuan sehingga terciptanya kesetaraan gender.

Dari hasil penelitian bahwa pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan melalui dua jalur yaitu. **Pertama** inisiatif pribadi perempuan tersebut untuk ikut bergabung dan berjuang bersama partai untuk kepentingan perempuan hal ini memiliki keunggulan dalam jumlah calon anggota legislatif tetapi memiliki kelemahan yaitu tidak diketahuinya seberapa kualitas dan wawasan calon anggota legislatif tersebut dan **Kedua** Pengrus terjun langsung ke masyarakat untuk mencari calon anggota perempuan yang memiliki integritas dan kualitas yang unggul, cara ini memiliki keunggulan bahwa calon legislatif perempuan memiliki kualitas dan wawasan yang

mumpuni tetapi memiliki kelemahan jumlah yang sedikit dan membutuhkan usaha lebih keras untuk memenuhinya

PDI Perjuangan memiliki cukup banyak kader baik kader laki-laki maupun perempuan, masing-masing dari mereka memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi calon legisaltif dari PDI Perjuangan. Pada tahapan seleksi pencalonan ini tidak ada peraturan yang mengistimewakan antara laki-laki dengan perempuan karena bagi PDI Perjuangan baik kader laki-laki maupun perempuan adalah sama dan memiliki hak serta kewajiban yang sama pula. Untuk menjadi Seorang calon legislated seorang kader harus mengikuti tiga tahapan seleksi yaitu tahapan penjaringan, tahapan penyaringan dan tahapan penetapan

Kata Kunci : Pemilu, Rekrutmen dan affirmative action

LATAR BELAKANG

Dewasa ini, masalah mengenai ketimpangan gender di Indonesia masih dapat ditemukan dalam berbagai lingkup kehidupan, baik sosial maupun politik. Ketimpangan ini yang akhirnya menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Hal ini masih terjadi di dalam struktur lembaga perwakilan negara kita. Tuntutan pemenuhan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya di lembaga legislatif

kini menjadi salah satu masalah yang krusial.

Belajar dari pengalaman beberapa negara lain, untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik maka diterapkanlah kebijakan *Affirmative Action* dengan system kuota. Kebijakan ini diambil dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen, sehingga dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.

Pada Pemilu legislatif 2014 Keterpilihan calon legislatif dengan keterwakilan terkecil adalah dari partai Nasdem yang hanya mampu mendapatkan satu kursi di DPRD Kota Semarang, disusul dengan dua kursi dari PPP, serta PKB dan PAN yang mendapatkan masing-masing 4 kursi di Golkar dengan menempatkan 5 anggotanya di kursi DPRD Kota Semarang, Demokrat dan PKS yang masing-masing mendapatkan 6 Kursi di DPRD Kota Semarang, Partai Gerindra yang mendapatkan 7 kursi di DPRD Kota Semarang, Perolehan suara tertinggi dalam pemilu legislatif kota Semarang adalah PDIP yang berhasil mendapatkan 15 Kursi di DPRD Kota Semarang. Dari 11 anggota legislatif perempuan Kota Semarang yang memiliki angka keterwakilan tertinggi

adalah dari PDIP dengan keterwakilan 5 orang dan yang paling rendah angka keterwakilannya adalah PKB, Golkar, Gerindra dan PAN yang masing-masing hanya menyumbangkan satu wakilnya saja di DPRD Kota Semarang dan yang tidak memiliki wakil perempuan di DPRD Kota Semarang adalah Partai Nasdem, PKS, PPP, PKPI dan PBB. Dari data tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Kota Semarang sudah cukup bagus meskipun belum mencapai ketentuan minimal 30%, karena Kota Semarang sudah mampu mencapai 22%. Tentu hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Berbagai strategi ditempuh untuk mencapai angka 30% keterwakilan perempuan, terutama bagi calon legislatif perempuan yang mampu

terpilih lebih dari satu periode. Kesetaraan gender dalam konteks keterwakilan perempuan sangatlah penting, apalagi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan sistem hukum adat serta budaya.

Di Indonesia keterwakilan perempuan sangatlah penting. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa jumlah perempuan relatif sama dengan laki-laki. Namun dalam kenyataannya, dan dalam sejarah Indonesia jumlah keterwakilan perempuan di legislatif sangatlah kecil. Sedikitnya jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif mungkin merupakan salah satu mengapa isu-isu tentang perempuan belum menjadi prioritas utama dalam hasil kebijakan pemerintah.

PERUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana respons PDI Perjuangan DPC Kota Semarang dalam pemenuhan kuota perempuan pada pencalonan legislatif 2019
- b. Bagaimana upaya PDI Perjuangan DPC Kota Semarang dalam memenuhi kuota tersebut
- c. Kendala yang dihadapi PDI Perjuangan dalam memenuhi kuota tersebut

TUJUAN PENELITIAN

- a. Menjelaskan respons PDI Perjuangan DPC Kota Semarang
- b. Menjelaskan upaya PDI Perjuangan dalam memenuhi ketentuan kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif.

- c. Mengidentifikasi kendala PDI Perjuangan dalam rekrutmen perempuan

MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Memberi sumbangan berbagai konsep pemikiran baik bagi kalangan akademisi maupun tokoh politik terkait hubungan antara politik dan gender dalam hal upaya partai untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30%.

. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Serta dapat mengetahui factor-faktor apa saja yang menghambat partisipasi perempuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat

menjadi pedoman bagi partai politik untuk lebih menekankan fungsinya dan memberikan Pendidikan politik bagi perempuan agar perempuan dapat secara aktif dalam politik dan terwakili secara politik.

METODE PENELITIAN

DESAIN PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu model penelitian dengan mencatat, mendeskripsikan dan menginterpretasikan partisipasi politik perempuan di PDIP kota Semarang. Penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamat

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang dikenal oleh penelitian kualitatif pada umumnya pertama wawancara, kedua teknik observasi, ketiga dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu

1. Teknik wawancara, Teknik ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan melalui wawancara secara mendalam. Wawancara sebagai penuntun peneliti dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka kepada informan. Selanjutnya informan

diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat tentang suatu gejala fenomena dan situasi. Sumber data utama Dalam penelitian ini adalah data data dan tindakan selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Untuk melengkapi data dalam penelitian ini digali dari berbagai sumber data primer maupun sekunder.

2. Teknik Dokumentasi, Teknik analisa data yang digunakan merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokomen yang digunakan peneliti berupa foto maupun dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi terkait

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Respons DPP PDI Perjuangan Terhadap Affirmative Action

Peraturan terkait afirmatif action tersebut memaksa partai untuk berlomba-lomba mencari anggota perempuan termasuk yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan merupakan salah satu partai peserta pemilu 2019 yang bersifat berideologi nasionalis dan memiliki basis masa yang besar di beberapa wilayah di Indonesia khususnya di Jawa Tengah. PDI Perjuangan pada dasarnya mendukung adanya kebijakan tentang 30% keterwakilan perempuan di parlemen agar seluruh kepentingan dari masyarakat bisa diakomodasi, salah satunya adalah kepentingan perempuan yang akan efektif jika di

akomodasi juga oleh legislator perempuan. Dalam perekrutan calon legislatif DPP PDI Perjuangan berpegang pada peraturan pelaksanaan pemilu seperti halnya pemenuhan kuota 30% Perempuan dalam pencalonan legislatif dan penggunaan sistem zipper system dalam daftar calonnya.

2. Respons DPC PDI Perjuangan Kota Semarang Terhadap Affirmative Action

PDI Perjuangan Kota Semarang menyambut baik peraturan KPU terkait minimal keterwakilan 30% dalam pencalonan legislatif karena dapat memberikan keuntungan politis bagi partai dan makin menguatkan posisi partai dalam masyarakat karena jika dilihat perbandingan penduduk Kota Semarang antara laki-laki dan perempuan hampir sama, hal ini

menunjukkan besarnya peluang partai untuk menyerap suara dan dukungan dari konstituen perempuan dengan menghadirkan calon-calon legislatif perempuan

3. Respons DPC PDI Perjuangan Kota Semarang Terhadap Affirmative Action

Caleg Perempuan PDI Perjuangan memanggapi Kebijakan affirmative bagi perempuan amatlah penting karena dengan adanya kebijakan affirmative ini lebih menjamin posisi dan kedudukan perempuan secara politis ditambah lagi dengan sistem pemilu yang menggunakan sistem proposional terbuka ini jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Memang dalam affirmative action ini baru berbicara tentang aturan batas minimal keterwakilan perempuan pada

kepengurusan partai dan pencalonan legislatif, dalam affirmative action yang ada di Indonesia belum mengatur hal-hal yang secara spesifik mengarah pada peningkatan jumlah keterpilihan calon legislatif dalam pemilu, tetapi hal ini juga sudah baik, DPC PDI Perjuanganpun juga sangat mengakomodasi kader-kader perempuannya dan memberikan akses yang cukup untuk perempuan sama-sama berpartisipasi dan berjuang bersama kader laki-laki untuk kepentingan masyarakat

4. Rekrutmen Anggota Perempuan

Rekrutment politik dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap masyarakat, tak terkecuali oleh Seorang perempuan. Rekrutment calon legislatif perempuan sangatlah penting.

Dengan adanya perekrutan calon legislatif seorang perempuan yang sesuai dengan peraturan perUndang-undang akan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk beraspirasi dalam dunia politik. Pemilihan atau seleksi calon legislatif perempuan sangat dibutuhkan karena dengan adanya perekrutan calon legislatif seorang perempuan yang sesuai dengan Undang-undang akan memberikan peluang yang sama bagi perempuan untuk memnuhi kepetingan perempuan dalam dunia politik .

5. Kaderisasi Perempuan di DPC PDI Perjuangan Kota Semarang

Pelaksanaan kadrisasi di PDI Perjuangan dilakukan dengan dua acara yaitu melalui Pendidikan kader dan pelatihan kader (Diklat) yang telah di

tentukan oleh partai. Kaderisasi di PDI Perjuangan dilakukan secara berjenjang mulai dari kaderisasi tingkat pertama yang dilakukan oleh DPC, kaderisasi madya dang dilakukan DPD dan yang paling akhir adalah kaderisasi madya yang di lakukan tingkat DPP. Materi dalam kaderisasi adalah materi yang bersifat umum seperti penanaman ideologi kenegaraan, Sedangkan materi yang khusus mengenai partai adalah sejarah dan perjuangan partai, program-program partai, dan garis-garis kebijakan partai.

6. Pengurus Perempuan di DPC PDI Perjuangan Kota Semarang

Dalam proses pengisian jabatan di PDI Perjuangan dilakukan dengan Konfrenesi Cabang (Konfercab) yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan merupakan tanggung jawab DPC yang

dipimpin oleh DPP partai dan/atau DPD partai yang mendapat mandate dari DPP, Konfrensi Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Utusan PAC, terdiri dari sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah PAC dan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah utusan PAC.

7. Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan di DPC PDI Perjuangan Kota Semarang

Pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif DPR DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di PDI Perjuangan berdasarkan Peraturan Partai Nomor 25A Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Rekrutmen yang dijalankan oleh PDI Perjuangan melalui tiga tahapan mulai dari

penjaringan, penyaringan dan penetapan, ketiga tahapan dapat dijelaskan sebagai berikut

8. Faktor Pendorong Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan

Kemenangan-kemenangan PDI Perjuangan pada Pemilu di Kota Semarang menjadi salah satu factor pendukung partai dalam rekrutmen politik perempuan, dengan besarnya basis masa PDI Perjuangan maka para calon legislatif perempuan yang berkeinginan untuk menjadi anggota legislatif bergabung dengan PDI Perjuangan. Walaupun banyak sekali caleg perempuan yang motivasi utamanya hanya menggunakan PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik dalam memperoleh kekuasaan saja.

Calon legislatif perempuan yang menjadi anggota PDI Perjuangan

juga terdorong oleh kekagumannya terhadap figur Bung Karno dan putrinya Megawati Soekarno Putri. Soekarno yang nasionalis dan begitu berkarakter begitu banyak memberikan pengaruh terhadap banyaknya masyarakat yang bergabung ke PDI Perjuangan, sedangkan Megawati banyak di idolakan oleh masyarakat tertutamanya kaum perempuan karna bukan hanya dirinya sebagai Ketua Umum Partai dan merupakan Presiden perempuan pertama di Indonesia, tapi Megawati dinilai dapat merepresentasikan perempuan Indonesia yang kuat dan teguh dalam memperjuangkan kepentingan bangsa makanya tak heran jika banyak alasan perempuan masuk ke PDI Perjuangan lantaran ketokohan Megawati ini

kedua figur ini menjadi bagian yang tidak terlepas dari eksistensi PDI Perjuangan. Bukan tidak mungkin tokoh tokoh lain dari PDI Perjuangan yang dikagumi oleh masyarakat sehingga mereka tertarik masuk keanggotaan PDI Perjuangan. Keaktifan kader PDI Perjuangan juga berpengaruh terhadap rekrutmen anggota baru PDI Perjuangan, kalau kader aktif maka anggota yang direkrut juga semakin meningkat. Selain keaktifan kader PDI Perjuangan, perilaku baik kader PDI Perjuangan di masyarakat juga mendukung antusias masyarakat masuk menjadi anggota PDI Perjuangan.

9. Faktor Penghambat Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan

Proses pelaksanaan rekrutmen calon legislatif perempuan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kota Semarang tidak sepenuhnya berjalan dengan apa yang di harapkan oleh partai dan masyarakat, kondisi tersebut dikarenakan terdapat beberapa hambatan-hambatan yang membuat hasil rekrutmen calon legislatif perempuan tidak berjalan efektif. Beberapa hambatan itu diantaranya

- a. Kehadiran suatu partai politik tidak mampu memberikan nilai tawar yang lebih terhadap suara caleg perempuannya. Keberadaan parpol hanyalah sarana untuk mencalonkan diri sebagai sebagai calon legislatif. Partai PDI Perjuangan juga

tidak memberi pendampingan khusus bagi perempuan dan juga tidak memberikan bantuan khusus bagi calon legislatif perempuan baik berupa bantuan materi maupun bantuan alat peraga kampanye, membuat calon legislatif kesulitan untuk mendapatkan banyak suara.

- b. PDI Perjuangan tidak mempunyai strategi khusus yang berfungsi untuk meningkatkan keterpilihan perempuan di DPRD Kota Semarang. Kehadiran calon legislatif perempuan terkesan untuk pemenuhan persyaratan agar PDI Perjuangan dapat menjadi peserta pemilu. Pengurus partai tidak pernah menyiapkan strategi khusus

yang berfungsi untuk meningkatkan perolehan suara caleg perempuan.

KESIMPULAN

PDI Perjuangan dalam merekrut anggotanya perempuan menggunakan dua cara *Pertama* adalah inisiatif pribadi calon anggota perempuan tersebut untuk bergabung menjadi anggota dari partai. Cara yang ini relative lebih memudahkan partai untuk mendapatkan anggota-anggota perempuan baru yang ada di masyarakat, tetapi dengan cara yang seperti ini tidak dapat dipastikan apakah calon anggota perempuan yang bergabung mempunyai kualitas yang baik atau tidak karna belum di ketahui rekam jejaknya sebelumnya. Cara ini lebih menjanjikan dari segi kwanritas daripada kualitas calon kader. *Kedua*,

PDI Perjuangan aktif turun ke berbagai lapisan masyarakat untuk mencari calon anggota perempuan yang memiliki potensi yang mumpuni di bidang akademis juga aktif mencari tokoh perempuan (tokoh masyarakat) yang memiliki pengaruh besar di lingkunganya. Dengan cara ini mesin partai harus bekerja sangat keras dan terjun langsung ke segala lapisan masyarakat untuk menemukan calon-calon kader perempuannya yang memang memiliki potensi yang mumpuni, Cara ini lebih menjannjikan di segi kualitas daripada kwanritas calon kader perempuan. Pada dasarnya PDI Perjuangan tidak menemui suatu kendala yang serius terkait rekrutmen anggota perempuannya, ini dikarnakan jumlah perempuan yang ingin

bergabung menjadi anggota PDI Perjuangan sangatlah banyak.

SARAN

Pada tahapan rekrutmen PDI Perjuangan tidaklah mudah karena bakal calon anggota legislatif PDI Perjuangan haruslah melalui tahapan-tahap kaderisasi dan persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi.

Untuk meningkatkan keterpilihan calon legislatif perempuan PDI Perjuangan Kota Semarang harus aktif terjun kemasyarakat khususnya perempuan untuk memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. PDI Perjuangan juga harus menalankan program-program partai secara maksimal terutama program yang menyangkut hak-hak perempuan

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 1992. *Dasar-Daasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Rahayu, Haryani. 2009. *Perempuan Dan Partai Politik Dalam Prespektif Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Cleves, Jula. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Mansour, Fakih. 1996. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Aryanto, Satya. 2006. *Hak Asasi Manusia dalam Trasisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara
- Wijayani, Ani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Kompas.
- Hagopain, Mark N. Regiems. 1978. *Movments adn Ideologis, New York and London: Logman*.
- Subakti, Ramlan. 1992.

Muchlis, Edison. 2007. *Pelebagaan Partai Politik di Indonesia Pascaordebaru*. Jakarta: LIPi Press

Aprilia, Lucky Sandra. 2017. *Partai dan Sistem Kepartaian Era Revormasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Mulia, Musdah dan Anik Farida. 2005. *Perempuan & Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Soetjipto, Ani Widayani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Mc.Closky, Herbert. 2010. International Encyclopaedia of the Social Sciences, dalam Dasar Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Subakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia

Lexy J Moleong.2001. *Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung: Remaja Rosda Karya

IFES, *Keterwakilan Perempuan di Lembaga-Lembaga Nasional yang Anggotany Dipilih Melalui Pemilu*, Jakarta:IFES,2000, hal 7-19

Kantaprawira, Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia suatu model pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cetakan kesembilan

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No 39 tahun 1999 Pasal 4

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 27 ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 65 ayat 1 nomor 12 tahun 2003

Sumber Lainnya

[Lib.unnes.ac.id](http://lib.unnes.ac.id)

[Id.scribd.com](http://id.scribd.com).

Eprinsts.undip.ac.id

Indopolitka.com